

ANALISIS KEBIJAKAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS) DI DINAS PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN BANTUL

AN ANALYSIS OF INFIRMARY ROOM POLICY IN BANTUL PRIMARY SCHOOL DEPARTMENT

Oleh : Agnes Septiani, (12110241021), Jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, Prodi Kebijakan Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, agnesseptiani94@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mendeskripsikan mengenai analisis kebijakan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul. Analisis kebijakan ini terkait proses kebijakan dan pendekatan perumusan kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek penelitiannya adalah kepala bidang sekolah dasar, koordinator, dan staff Tim Pembina UKS. Objek penelitian adalah data mengenai kebijakan UKS khususnya tentang perumusan kebijakan UKS. Data diperoleh dengan cara wawancara dan dokumentasi. Instrumen penelitian adalah peneliti yang dibantu dengan pedoman wawancara dan pedoman dokumentasi. Analisis data menggunakan *interactive model* yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yaitu, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil dari penelitian menunjukkan: 1) kebijakan UKS di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul adalah Pembentukan Tim Pembina UKS dan tiga program kerja UKS yaitu Program Lomba Sekolah Sehat, Lomba Dokter Kecil, dan Program Pemberian Susu untuk Anak SD/Mi, 2) Tahap Analisis kebijakan UKS ketiga program tersebut terdiri atas: a) Penyusunan agenda kegiatan. Pendekatan perumusan kebijakan yang digunakan adalah *man-power approach*; b) Formulasi kegiatan untuk ketiga program dilakukan oleh pemerintah pusat, dinas sebagai pelaksana. Pendekatan perumusan kebijakan yang digunakan adalah *man-power approach*; c) Evaluasi dilakukan berdasarkan pendekatan perumusan kebijakan *man-power approach*. Ditemukannya nilai-nilai yang terkandung dalam program-program UKS yaitu nilai percaya diri, disiplin, dan tanggung jawab.

Kata kunci : Analisis Kebijakan, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)

Abstract

This research described about an analysis of Infirmary Room Policy in Bantul Primary School Department. The analysis of policy was related to the process of policy and the approach of formulation policy. This research was a qualitative descriptive approach. The subjects of this research were Primary School Principal, the Coordinator and the staff of Infirmary Advisor Team. The object of this research was the data of Infirmary Room Policy especially the formulation policy of Infirmary Room. The data were obtained from the interviews and the documentation. The instruments were the researcher that was helped by the interviews and the documentation guidance. The data analyses were obtained through Interactive Model that is developed by Miles and Huberman. They were data reduction, data presentation, data verification and conclusion. The data validity was tested by using source and technique triangulation. The result showed as follows; 1). The Infirmary Room Policies in Bantul Primary School Department are the establishment of Infirmary Advisor Team and three Infirmary Room's Jobs, there were Healthy School Race Program, The Kid Doctor Race Program, and The Milk Subvention Program for Elementary Students, 2) The steps of three Infirmary Room's Program consist of a) The arrangement of Healthy School Race and Kid Doctor Race Program, the agenda was arranged based on National Race Guidance. The Milk Subvention Program for Elementary Students, the Primary School Department did not arrange the agenda. It could be happen because the agenda was arranged by Bantul Government. There was using non-power approach to formulate the policy; b) The formulation that used in three programs was done by Central Government and Provincial Sub-Project Management as an executor. There was using man-power approach to formulate the policy; the evaluation was done based on the man-power approach. The local agencies monitored the Infirmary Room in the school. There was found the Infirmary programs value, i.e. self-confidence, disciplines, and responsibility.

Keyword: Policy Analysis, School Health Unit (UKS)

PENDAHULUAN

Salah satu upaya strategis untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia dapat dilakukan melalui pendidikan dan kesehatan. Upaya ini dirasa tepat dilakukan melalui institusi pendidikan sekolah, karena sekolah merupakan tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar harus menjadi “*Health Promoting School*”, yaitu sekolah yang dapat meningkatkan derajat kesehatan warga sekolah yang mencerminkan hidup sehat bagi warga sekolahnya. Mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal, terjamin berlangsungnya proses belajar mengajar dengan baik, terciptanya kondisi yang mendukung, dan tercapainya kemampuan peserta didik untuk berperilaku hidup sehat.

Di dalam Undang-Undang Nomer 23 Tahun 1992 dinyatakan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan nasional. Selain itu, pada Bab V pasal 45 disebutkan bahwa

“Kesehatan diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup sehat, sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh, dan berkembang secara harmonis dan optimal menjadi sumber daya manusia yang lebih berkualitas”. (Tim Pembina Kesehatan Sekolah, 2010)

Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa

“Pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”.

Untuk itu berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendiknas, Menkes, Menag, dan Mendagri Nomor : 2/P/SKB/2003, Nomor : MA/230B/2003, Nomor : 445-404 Tahun 2003 tanggal 23 Juli 2003 tentang tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah menjadi landasan hukum utama terciptanya kebijakan tentang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) sebagai salah satu kebijakan pendidikan sebagai upaya untuk mencapai generasi sehat sekolah dikenal dengan promosi kesehatan sekolah.

Health Promoting School adalah sekolah yang telah melaksanakan UKS dengan ciri-ciri melibatkan kepala sekolah, guru, siswa, puskesmas serta semua pihak yang berkaitan dengan masalah kesehatan sekolah, menciptakan lingkungan sekolah yang sehat dan aman, memberikan pendidikan kesehatan di sekolah, memberikan akses terhadap pelayanan kesehatan, ada kebijakan dan upaya sekolah untuk mempromosikan kesehatan dan

berperan aktif dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. (Depkes RI, 2004) Akar dari sekolah sehat adalah pendidikan kesehatan dan lingkungan sekolah sehat (Konu & Rimpela, 2002).

Tim Pembina UKS dalam Isroi (2012:8), menyebutkan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) adalah usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan mulai Taman Kanak-kanak (TK) sampai dengan Sekolah Menengah Atas, Kejuruan, atau pun Aliyah (SMA/SMK/MA). UKS merupakan upaya terpadu lintas program dan lintas sektoral dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan serta membentuk perilaku hidup sehat anak usia sekolah yang berada di sekolah dan perguruan agama. UKS merupakan kegiatan sekolah yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sekolah, baik untuk siswa maupun guru atau karyawan di sekolah tersebut. Pelaksanaan UKS ditingkat pendidikan dasar (TK dan SD) berbeda dengan tingkat menengah (SMP dan SMA).

Namun, selama ini masih terdapat sekolah beranggapan bahwa pelaksanaan UKS hanya sebatas pada adanya ruang UKS saja terutama di sekolah dasar (SD). Bahkan, UKS di sejumlah sekolah dasar pemanfaatannya tidak optimal. Hal ini disebabkan karena apabila siswa SD tiba-tiba merasa tidak sehat, pihak sekolah

langsung menghubungi orang tua untuk menjemput anaknya. Padahal pelaksanaan UKS adalah terlaksananya TRIAS UKS yaitu lingkungan kehidupan sekolah yang sehat, pendidikan kesehatan, dan pelayanan kesehatan di sekolah secara utuh.

Dalam pelaksanaan program UKS ditinjau dari segi sarana prasarana, pengetahuan, sikap peserta didik di bidang kesehatan, warung sekolah, makanan sehari-hari atau gizi, kesehatan gigi, dan kesehatan pribadi dari evaluasi dan pengamatan yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, 2012), selama ini pula masih memperlihatkan bahwa prinsip hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik dirasakan belum mencapai dengan yang diharapkan, kegiatan pendidikan kesehatan lebih bersifat pengajaran, penambahan pengetahuan dan kurang menekankan pada segi praktis yang dapat diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari.

Secara umum sasaran upaya kesehatan ditinjau dari cakupan sekolah, peserta didik dikaitkan dengan wajib belajar, mutu pendidikan, ketenagaan dan sarana prasarana belum seimbang dengan tujuan UKS. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia (SDM) seperti kurangnya guru yang mengajar pendidikan kesehatan atau guru yang menangani UKS dan kader kesehatan sekolah yang terlatih dalam

bidang kesehatan baik pendidikan dan pelayanan (Kemendikbud Direktorat Jendral Pendidikan, 2012).

Implementasi kebijakan UKS di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul dapat dikatakan baik, terbukti berdasarkan adanya program sekolah sehat yang dilombakan setiap tahun nya untuk tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, hingga tingkat nasional pada tahun 2013 hingga tahun 2015, sekolah di wilayah Kabupaten Bantul berhasil menjadi juara di tingkat nasional untuk kategori kinerja terbaik (*best performance*) dan kategori pencapaian terbaik (*best achievement*). Pada tahun 2013, SD Negeri Tamanan Bantul meraih juara 1 tingkat nasional pada kategori pencapaian terbaik. Pada tahun 2014, SD Negeri Ngrukeman Kecamatan Kasihan Bantul berhasil meraih juara 1 tingkat nasional kategori kinerja terbaik. Tahun 2015 untuk kategori pencapaian terbaik, juara 1 tingkat nasional berhasil diraih oleh SD Negeri 1 Bantul (Sumber Depkes.go.id).

Dilihat dari hasil tersebut, UKS di Kabupaten Bantul untuk jenjang sekolah dasar lebih baik dibandingkan di kabupaten lain yang masih dalam satu wilayah. Dalam tiga tahun terakhir khususnya, Kabupaten Bantul selalu masuk 3 besar nasional mengalahkan Kabupaten Sleman, Gunung Kidul, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta, yang notabennya berada dalam satu

provinsi dengan Kabupaten Bantul. Artinya, kebijakan UKS dari Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul berhasil diinterpretasi dan diimplementasi dengan baik di sekolah. Akan tetapi, keberhasilan itu tidak disebarluaskan kepada daerah lain yang berada dalam satu wilayah.

Sebagai salah satu kebijakan lintas sektoral, UKS adalah salah satu kebijakan pendidikan dimana dinas pendidikan merupakan *policy maker* (pembuat kebijakan) dan *decision maker* (pembuat keputusan) untuk instansi atau lembaga dibawahnya, serta implementator kebijakan yang berasal dari instansi atau lembaga yang berada diatasnya. Dinas sebagai *policy maker* dan *decision maker* bekerjasama dengan Tim Pembina Kesehatan dalam membuat suatu kebijakan UKS tidaklah mudah, perlu melewati serangkaian proses kebijakan.

Proses kebijakan dapat dipahami sebagai serangkaian tahap atau fase kegiatan untuk membuat suatu kebijakan. Proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian tahap yang saling bergantung menurut urutan waktu. Tahapan tersebut yaitu tahap penyusunan agenda kebijakan, tahap perumusan alternatif (formulasi kebijakan), tahap penetapan kebijakan, tahap implementasi kebijakan, dan tahap evaluasi kebijakan. Nugroho (2011) menyebutkan kebijakan publik ini bukanlah sesuatu yang bisa dimainkan, dibuat secara

sembarangan, dilaksanakan secara sembrono, dan tidak pernah dikontrol atau dievaluasi.

Sejauh ini penelitian mengenai UKS hanya sebatas pada tahap implementasi kebijakan saja. Tidak membahas bagaimana proses perumusan kebijakan tersebut ditetapkan dan masalah-masalah apa saja yang ada di lapangan yang perlu diberi solusi pemecahannya, sehingga masih terdapat sekolah yang pelaksanaan UKS tidak berjalan secara optimal. Kebijakan UKS haruslah berorientasi pada permasalahan yang muncul di lapangan maupun berorientasi pada tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul. Persiapan yang matang akan memberikan solusi yang tepat untuk permasalahan yang ada.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mengetahui bagaimana dinas selaku implementator kebijakan mengimplementasi dan menginterpretasi kebijakan UKS yang berasal dari pusat, dan bagaimana posisi dinas selaku *policy maker* serta *decision maker* membuat rumusan kebijakan UKS yang berhasil diterapkan disekolah-sekolah. Maka, penting dilakukan penelitian mengenai “*Analisis Kebijakan UKS di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*”. Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui bagaimana analisis kebijakan UKS di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul terkait

proses pembuatan kebijakan dan faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses perumusan kebijakan secara keseluruhan, tidak hanya dalam proses implementasi UKS di sekolah-sekolah, tetapi mulai dari tahap awal perumusan masalah hingga evaluasi kebijakan UKS.

METODE PENELITIAN

a. Desain Penelitian

Pada penelitian ini, digunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif

b. Setting Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul dan dilaksanakan selama bulan Maret sampai April 2016.

c. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah kepala bidang sekolah dasar, koordinator beserta staff Tim Pembina UKS Kabupaten Bantul. Obyek adalah data mengenai kebijakan UKS khususnya tentang perumusan kebijakan UKS.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi.

e. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah peneliti dibantu dengan pedoman wawancara dan pedoman dokumentasi.

f. Analisis Data

Menggunakan *interactive* model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, penyajian data, dan verifikasi data.

g. Keabsahan Data

Uji keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan UKS di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul.

Kebijakan UKS di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul diawali dengan adanya pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP-UKS) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantul. Tim Pembina UKS Kabupaten Bantul adalah organisasi yang bertugas dan bertanggung jawab atas implementasi kebijakan UKS. Anggota dari Tim Pembina UKS Kabupaten terdiri dari lembaga-lembaga kedinasan lintas sektoral, seperti dinas pendidikan dasar, dinas pendidikan menengah, dinas kesehatan, BLH, puskesmas, dinas sosial, PKK, dan lain sebagainya sehingga dalam pembuatan kebijakan dalam hal ini program kerja tahunan tidak luput dari keterlibatan seluruh lembaga atau instansi terkait sebagaimana dalam pedoman pengembangan dan pembinaan UKS bagian kebijakan umum yang menyebut bahwa pembinaan dan pengembangan UKS dilaksanakan secara lintas program dan

lintas sektor melalui kegiatan yang terpadu dan berkesinambungan.

Tim pembina UKS Kabupaten Bantul mempunyai 27 program kerja yang dilaksanakan pada tahun 2015. Semua program tersebut dibagi untuk semua sektor terkait dan menjadi tanggung jawab masing-masing sektor. Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul bertanggung jawab atas 3 program yaitu program lomba sekolah sehat, lomba dokter kecil, dan program pemberian susu untuk anak sd/mi.

2. Interpretasi Kebijakan UKS di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul.

Kebijakan mengenai pembentukan sekretariat Tim Pembina UKS (TP UKS) Kabupaten Bantul merupakan salah satu wujud dari interpretasi yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul dalam menanggapi adanya Surat Keputusan Bupati No. 68 Tahun 2016. Dunn (2003) mengatakan dalam proses pembuatan kebijakan tahap yang harus dilalui adalah penyusunan agenda kegiatan, perumusan kegiatan, adopsi kebijakan, implementasi, dan evaluasi. Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul melakukan interpretasi pada program lomba sekolah sehat dan lomba dokter kecil saat tahap penyusunan agenda kegiatan yaitu dengan membuat kegiatan sesuai dengan agenda kegiatan untuk lomba ditingkat nasional.

Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul tidak melakukan interpretasi untuk

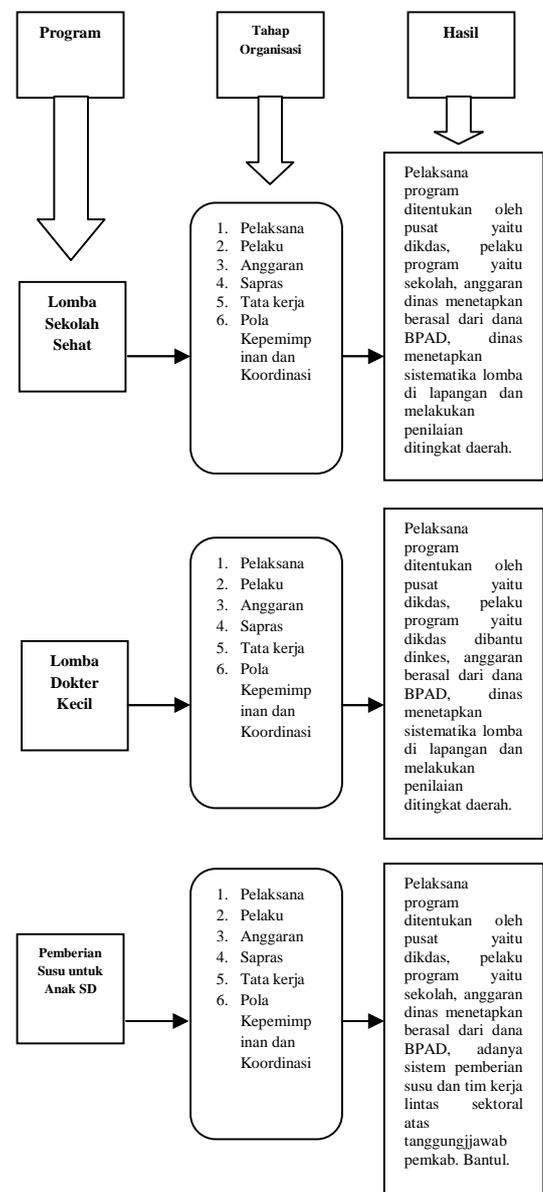
semua program saat tahap perumusan kebijakan, karena usulan-usulan kebijakan yang diberikan pada tahap penyusunan agenda tidak menjadi materi atau agenda pada proses pembuatan kebijakan (kebijakan *top-down*). Begitu pula pada tahap adopsi kebijakan. Dinas Pendidikan Dasar dan Tim Pembina UKS Kabupaten tidak menetapkan kebijakan maupun program, karena dari pusat sudah ditetapkan.

3. Pengorganisasian UKS di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul.

Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul terlibat dan melaksanakan beberapa komponen tahap organisasi berdasarkan teori organisasi yang diungkapkan oleh Joko Widodo. Dinas terlibat dan melaksanakan komponen pelaksana, pelaku, anggaran, tata kerja, pola kepemimpinan dan koordinasi pada program Lomba Sekolah Sehat. Dinas tidak terlibat dan melakukan tahap organisasi untuk komponen sarana dan prasarana.

Sama halnya pada Program Pemberian Susu Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul terlibat dan melaksanakan beberapa komponen tahap organisasi, yaitu pada komponen pelaksana, pelaku, anggaran, tata kerja, pola kepemimpinan dan koordinasi pada program Lomba Sekolah Sehat. Dinas tidak terlibat dan melakukan tahap organisasi untuk komponen sarana dan prasarana.

Begitu pula Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul terlibat dan melaksanakan beberapa komponen tahap organisasi, yaitu pada komponen pelaksana, pelaku, anggaran, tata kerja, pola kepemimpinan dan koordinasi pada program Lomba Sekolah Sehat. Dinas tidak terlibat dan melakukan tahap organisasi untuk komponen sarana dan prasarana. Berikut gambaran singkat mengenai pengorganisasian yang dilakukan Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul:



Gambar 1. Tahap Organisasi dalam Program UKS

4. Aplikasi UKS di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul.

Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan proses implementasi kebijakan ke dalam realitas nyata. Dalam hal ini, aplikasi adalah proses pelaksanaan program UKS yang dilakukan di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul yaitu proses pelaksanaan Program Lomba Sekolah Sehat, Program Dokter Kecil, dan Program Pemberian Susu untuk Anak SD/Mi. Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul dalam tahap aplikasi ini harus memperhatikan enam enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi menurut Van Meter dan Van Horn, yakni :

- a. Standar dan sasaran kebijakan
- b. Sumberdaya
- c. Hubungan antar organisasi
- d. Karakteristik agen pelaksana
- e. Kondisi sosial, ekonomi dan politik
- f. Disposisi Implementator/sikap pelaksana

Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul sudah memperhatikan komponen standar dan sasaran kebijakan pada Program Lomba Sekolah Sehat, dibuktikan dengan dinas menetapkan kriteria penilaian lomba dan waktu dan sasaran program yaitu pada Bulan Agustus dari tanggal 11-12 Agustus 2015 di SD Ngebel Kasihan, SD 1 Trirenggo Bantul, dan Plebengan. Komponen sumber daya juga diperhatikan oleh dinas, dimana dinas memilih sekolah

terbaik sebagai pemenang yang nantinya akan dikirimkan untuk wakil Kabupaten Bantul ditingkat nasional. Selain itu komponen hubungan antar organisasi juga diperhatikan oleh dinas dengan adanya kerjasama antara dinas pendidikan dengan sekolah, dinas kesehatan, dan BLH. Kemudian komponen karakteristik agen pelaksana, kondisi ekonomi, sosial, dan politik, serta disposisi dalam penelitian ini Dinas tidak terlibat.

Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul sudah memperhatikan komponen standar dan sasaran kebijakan pada Program Lomba Dokter Kecil, dibuktikan dengan dinas menetapkan kriteria penilaian lomba dan waktu dan sasaran program yaitu pada Bulan Februari 2015. Komponen sumber daya juga diperhatikan oleh dinas, dimana dinas memilih sekolah terbaik sebagai pemenang yang nantinya akan dikirimkan untuk wakil Kabupaten Bantul ditingkat nasional. Selain itu komponen hubungan antar organisasi juga diperhatikan oleh dinas dengan adanya kerjasama antara dinas pendidikan dengan sekolah dan dinas kesehatan. Komponen karakteristik agen pelaksana, kondisi ekonomi, sosial, dan politik, serta disposisi dalam penelitian ini Dinas tidak terlibat.

Khusus Program Pemberian Susu untuk Anak SD/MI, komponen standar dan sasaran kebijakan tidak diperhatikan oleh Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul

karena dilakukan oleh Pemkab. Bantul. Komponen hubungan antar organisasi diperhatikan oleh Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul dengan adanya kerjasama antara pemerintah kabupaten, dinas pendidikan, sekolah, dinas kesehatan, PKK, dan lain-lain. Kemudian komponen karakteristik agen pelaksana, kondisi ekonomi, sosial, dan politik, serta disposisi dalam penelitian ini tidak terlibat.

5. Evaluasi Kebijakan UKS di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul.

Evaluasi adalah penilaian untuk melihat sampai sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah yang dihadapi. Anderson mengatakan evaluasi dilakukan untuk melihat bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur, siapa yang mengevaluasi kebijakan, apa konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan, dan adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan. Dalam tiga program UKS hanya pada Program Lomba Sehat dan Lomba Dokter Kecil, untuk Program Pemberian Susu dinas tidak melakukan evaluasi.

Dinas melakukan evaluasi atau penilaian saat program berlangsung dan setelah program berakhir pada Lomba Sekolah Sehat. Evaluasi saat program berlangsung dilakukan untuk menentukan siapa pemenang hasil terbaik dengan melihat kriteria-kriteria yang dinilai. Evaluasi yang dilakukan di akhir program adalah untuk

melihat keberhasilan program, kendala yang dialami, dan sebagainya. Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul hanya fasilitator dan peserta evaluasi di tingkat daerah untuk tahap evaluasi akhir ini, yang berhak mengevaluasi atau memberikan penilaian akhir adalah dinas kesehatan.

Dinas melakukan evaluasi atau penilaian dinas lakukan saat program berlangsung dan setelah program berakhir pada Lomba Dokter Kecil. Evaluasi saat program berlangsung sama seperti pada lomba sekolah sehat yaitu dilakukan untuk menentukan siapa pemenang hasil terbaik dengan melihat kriteria-kriteria yang dinilai. Evaluasi yang dilakukan di akhir program adalah untuk melihat keberhasilan program, kendala yang dialami, dan sebagainya. Evaluasi akhir ini Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul hanya sebagai fasilitator dan peserta evaluasi di tingkat daerah, yang berhak mengevaluasi atau memberikan penilaian akhir adalah Tim Pembina UKS Kabupaten. Dinas tidak melakukan evaluasi pada Program Pemberian Susu untuk Anak SD/MI, dinas pendidikan, karena program ini dievaluasi langsung oleh Pemerintah Kabupaten Bantul yang memiliki wewenang. Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul hanya sebagai pelaksana program.

6. Proses Analisis Kebijakan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul.

Alur kebijakan berdasarkan model proses kebijakan menurut William N. Dunn adalah penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian (evaluasi) kebijakan. Bahwa alur kebijakan yang pertama adalah penyusunan agenda, pada tahap ini Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul melakukannya. Dari temuan penelitian ditemukan bahwa Dinas menyusun agenda kegiatan sesuai dengan pedoman untuk lomba ditingkat nasional.

Berdasarkan pendekatan perumusan kebijakan *man-power approach* Dinas melakukan usulan kegiatan mengaktifkan seluruh program UKS, mengadakan sosialisasi, dan ditingkatkannya koordinasi tersebut untuk menangani masalah-masalah yang ditemukan. Usulan tersebut didasari pada pendekatan perumusan kebijakan *man-power approach* yaitu bahwa pemerintah Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul melakukan tahap ini tidak melihat adanya permintaan dari masyarakat, tetapi pemerintah memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam pelaksanaan kebijakan UKS tersebut.

Tahap kedua adalah formulasi kebijakan, Dinas daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul tidak melakukan, ini terlihat dari pendekatan perumusan kebijakan *man-power approach*, karena hal ini dilakukan oleh pemerintah pusat (TP UKS Pusat), dinas daerah hanya

menyesuaikan dan melaksanakan tugas yang diberikan dan diputuskan oleh pusat, seperti melaksanakan lomba sekolah sehat, lomba dokter kecil di tingkat daerah, dan pemberian susu untuk anak SD/Mi, dan memonitoring keterlaksanaan UKS di sekolah. Mengenai bagaimana proses merumuskan kebijakan, kejelasan kebijakan terhadap lanjutan implementasi UKS menjadi wewenang pemerintah pusat.

Tahap ketiga adalah adopsi kebijakan, tahap ini merupakan tahap penentuan kebijakan. Kebijakan UKS disahkan oleh pemerintah pusat berdasarkan SKB 4 Menteri. Pendekatan perumusan kebijakan pada tahap ini adalah *man-power approach*, Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul hanya melaksanakannya. Tahap keempat adalah implementasi kebijakan, berdasarkan pendekatan perumusan kebijakan *man-power approach* bahwa Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul melakukan tahap ini sesuai dengan keputusan dan pedoman yang sudah ada, dinas daerah hanya melaksanakan kebijakan tersebut agar sampai pada sekolah-sekolah. Rapat koordinator program kerja dilakukan dinas juga berdasarkan atas kebijakan mengenai UKS, menyesuaikan rambu-rambu yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Tahap kelima adalah evaluasi kebijakan, berdasarkan pendekatan perumusan kebijakan *man-power approach*

bahwa Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul melakukan kegiatan evaluasi program Lomba Sekolah Sehat dan Lomba Dokter Kecil. Kegiatan ini didasari atas keterlaksanaan program dilapangan dengan harapan tujuan yang ingin didapatkan dari program.

Berdasarkan kelima tahap proses kebijakan yang telah dijelaskan diatas memberikan kesimpulan bahwa analisis kebijakan UKS di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul lebih banyak terlihat pada pendekatan perumusan kebijakan dengan *man-power approach* daripada *social demand approach*. Analisis Kebijakan UKS dengan pendekatan perumusan kebijakan *man-power approach* berarti bahwa pemerintah memiliki wewenang dan tanggungjawab, serta kebijakan yang dibuatnya dapat berlangsung secara efisien dalam perumusannya, dan lebih berdimensi jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Diterjemahkan oleh: Samodra Wibawa, dkk. Yogyakarta: Gadjah Mada University

Joko Widodo. (2008). *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Bayumedia

Konu & Rimpela. (2002). Well-being in schools: A conceptual model. *Health Promotion International Vol. 17, No. 1*, 79-87

Miles, Matthew B dan Huberman, A Michael. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Diterjemahkan oleh: Tjetjep Rohendi Rohid. Jakarta. Universitas Indonesia Press

Tim Pembina UKS. (2008). *Pedoman Pembinaan dan Pengembangan UKS*. Jakarta: Balai Pustaka.